

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Penelitian

Sejarah perjalanan Bangsa Indonesia tentang pendidikan formal PPKn secara alamiah telah disiapkan melalui salah satu wahana politik untuk menyiapkan warga negara yang sesuai dengan tujuan NKRI. Melalui disiplin ilmu-ilmu sosial terutama ilmu politik dalam kurikulum mengambil bagiannya yaitu pesta demokrasi yang terdidik. Pesta demokrasi yang terdidik dengan cara pendidikan dalam berpolitik maka melahirkan konsep pendidikan politik bagi warganya. Sehingga di sini lahirnya embrio mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang berubah sesuai dengan jaman politiknya. Tujuan PPKn di sini agar menjadi warga yang baik (*good Citizen*).

Wahab dan Sapriya (2011:290) mengatakan Upaya itu nampak dari lahirnya berbagai nama untuk pendidikan kewarganegaraan (PKn) sejalan dengan perkembangan dan pasang surutnya perjalanan politik Bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan lahirnya berbagai kebijakan di bidang pendidikan khususnya tentang PKn sebagai tindak dari Dekrit Presiden 1959 untuk kembali pada UUD 1945, diantaranya dengan intruksi pembaharuan buku-buku di universitas-universitas.

Konteks di atas pembahasan tentang Civics sebagai mata pelajaran yang menekankan pada aspek teoritik tentang warga negara dengan warga negara dan warga negara dengan pemerintah yang diatur oleh hukum merupakan cabang dari ilmu politik yang disebut dengan *political democracy*. Studi tentang demokrasi politik di sekolah tampil dengan aspek-aspek yang berbeda. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) ilmu terapan dari Civics, sedangkan nama Kewarganegaraan, Pendidikan Moral Pancasila dan Keawarganegaraan (PMP dan Kn), dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), nama-nama PKn tersebut berubah sesuai dengan situasi dan kondisi politik pada zamannya.

Kurikulum tahun 1946 maupun dalam Kurikulum tahun 1957. Perkembangan kurikulum. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam hasanah dunia sistem pendidikan nasional sudah mengalami beberapa perubahan, baik dari istilah, nama, konten/isi materi, metoda, media, evaluasi, dan konsep tujuan yang tidak konstan dari zaman ke zaman dipengaruhi situasi sosial politik dan Iptek yang selalui berubah-ubah dan mengembang walaupun ideologi Negara Indonesia masih tetap yaitu ideologi Pancasila. Ini terjadi nampaknya sedang mencari jati diri-Nya dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional yang efektif dan efesien (Wahab dan Sapriya, 2011:14).

Hal tersebut dapat dilihat perkembangan PKn dalam sistem pendidikan nasional dari Indonesia merdeka sampai sekarang. Secara historis, epistemologis dan pedagogis, pendidikan kewarganegaraan berkedudukan sebagai program kurikuler dimulai dengan diindoktrinasikannya. Namun secara materiil dapat dilihat dalam kurikulum 1946 terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasukkan pengetahuan mengenai pemerintahan dan dalam Kurikulum SMP dan SMA tahun 1957 terdapat mata pelajaran tata negara dan tata hukum (Somantri, 1975:5).

Kemudian dalam kurikulum tahun 1968 dan 1969 istilah *civics* dan Pendidikan Kewargaan Negara (PKn) digunakan secara bertukar-pakai (*interchangeably*). Misalnya dalam Kurikulum SD 1968 digunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara yang dipakai sebagai nama mata pelajaran, yang di dalamnya tercakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan *civics* (diterjemahkan sebagai pengetahuan kewargaan negara). Dalam kurikulum SMP 1968 digunakan istilah Pendidikan Kewargaan Negara yang berisikan sejarah Indonesia dan Konstitusi termasuk UUD 1945 (Putra, 2009).

Kurikulum tahun 1975 istilah PKn diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Perubahan ini sejalan dengan misi pendidikan yang diamanatkan oleh Tap MPR II/MPR/1973. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib untuk SD, SMP, SMA, SPG dan Sekolah Kejuruan. Mata pelajaran PMP ini terus dipertahankan baik istilah

maupun isinya sampai dengan berlakunya Kurikulum 1984 yang pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 1975. Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada masa itu berorientasi pada *value inculcation* dengan muatan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 (Wirataputra U.S: 2001, 6).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggariskan adanya muatan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn), sebagai bahan kajian wajib kurikulum semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan (Pasal 39), Kurikulum Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 1994 mengakomodasikan misi baru pendidikan tersebut dengan memperkenalkan mata pelajaran (PPKn). Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, Kurikulum PPKn 1994 mengorganisasikan materi pembelajarannya bukan atas dasar rumusan butir-butir nilai P4, tetapi atas dasar konsep nilai yang disaripatikan dari P4 dan sumber resmi lainnya yang ditata dengan menggunakan pendekatan spiral meluas atau *spiral of concept development* (Taba:1967). Pendekatan ini mengartikulasikan sila-sila Pancasila dengan jabaran nilainya untuk setiap jenjang pendidikan dan kelas serta catur wulan dalam setiap kelas (Wirataputra U.S: 2001, 17).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada masa ini karakteristiknya didominasi oleh proses *value incucation* dan *knowledge dissemination*. Hal tersebut dapat dilihat dari materi pembelajarannya yang dikembangkan berdasarkan butir-butir setiap sila Pancasila. Tujuan pembelajarannya pun diarahkan untuk menanamkan sikap dan perilaku yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk memahami, menghayati dan meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berperilaku sehari-hari (Wirataputra U.S: 2001, 15).

Dengan diberlakukannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, diberlakukan kurikulum yang dikenal dengan nama Kurikulum berbasis Kompetensi tahun 2004 dimana PKn berubah nama menjadi Kewarganegaraan. Tahun 2006 namanya berubah kembali menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dimana secara substansi tidak terdapat perubahan yang berarti, hanya kewenangan pengembangan kurikulum yang diserahkan pada

masing-masing satuan pendidikan, maka kurikulum tahun 2006 ini dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Putra, 2009).

Berbagai perubahan yang dialami dalam pengimplementasian PPKn sebagaimana diuraikan diatas menunjukkan telah terjadinya ketidakajekan dalam kerangka berpikir yang sekaligus mencerminkan telah terjadinya krisis konseptual yang berdampak pada terjadinya krisis operasional kurikuler tentang nama, konten, metoda, strategi, dan tujuan.

Dari penggunaan istilah tersebut sangat terlihat jelas ketidakajekannya dalam mengorganisir pendidikan kewarganegaraan, yang berakibat pada krisis operasional, dimana terjadinya perubahan konteks dan format pendidikannya. Program PKn masih berjalan sendiri-sendiri sehingga persoalan bangsa, khususnya dalam upaya pembangunan warga negara yang baik belum optimal dalam lingkup PKn sebagai program kurikuler.

Secara khusus dilihat dari tujuan PKn, pelaksanaan PKn di Indonesia masih belum sesuai harapan banyak kasus-kasus yang mencerminkan belum berhasilnya pembentukan warga negara yang baik dan cerdas. Kita banyak menemukan kasus Pelanggaran hukum dan moral yang dilakukan oleh para generasi muda dan pelajar kita seperti tawuran anarki, penyalahgunaan narkoba, kejahatan, kasus asulila dan lain-lain. Munculnya kasus-kasus tersebut disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal Wahab dan Sapriya (2011: 28).

Faktor internal muncul dari kondisi pendidikan di Indonesia yang belum dapat pembentukan warga negara yang baik dan cerdas. Kondisi Pendidikan ini dipengaruhi oleh keterbatasan kompetensi guru. kompetensi professional dan pedagogik Faktor eksternal didominasi oleh derasnya arus globalisasi yang berdampak pada kencangnya arus informasi yang masuk Indonesia tanpa terkendali. 'kran demokrasi' yang dibuka terlalu lebar pasca reformasi telah membawa bangsa ini pada *euphoria* kebebasan yang cenderung tanpa batas.

Wahab dan Sapriya (2011:14) mengatakan Kita yang berada dalam lingkungan komunitas akademik PKn tengah menghadapi sejumlah persoalan yang menjadi titik kelemahan sebagai berikut antara lain:

- a. Landasan-landasan yang tidak lengkap. Seyogyanya, landasan PKN sebagai program kurikuler meliputi landasan filosofis, ideologis, konstitusional, sosial kultur, dan akademik.
- b. Organisasi kurikulum belum memadai. Organisasi kurikulum, seyogyanya memiliki sistematisasi untuk tiap jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA.
- c. Lemahnya kualitas buku. Buku-buku kita ini relatif lemah dari segi isi penulisan, metoda penulisan, dan juga penampilan.
- d. Lemahnya metodologi. Bagian dari ilmu sosial yang paling lemah adalah sapek metode dibandingkan dengan ilmu eksakta.
- e. Kompetensi guru. Guru bukan berlatar belakang bidang studi PKN mengajarnya.

Menanggapi pada poin ke- 2 Organisasi Kurikulum belum memadai Zaman era globalisasi dan informasi yang begitu cepat mengglobal. Maka pentingnya peran dan fungsi kurikulum seharusnya sudah sangat disadari dalam sistem pendidikan nasional. Mengapa demikian? karena kurikulum merupakan alat yang krusial dalam merealisasikan program pendidikan, sehingga gambaran ruh sistem pendidikan dapat dilihat jelas dalam kurikulum itu terutama PPKn.

Sejalan dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengglobal sesuai dengan situasi sosial politik pada zamanya tersebut, Kurikulum PPKn menuntut adanya inovasi. Inovasi tersebut untuk menyesuaikan tuntutan zaman dan tuntutan tujuan pendidikan itu sendiri. Maka pengembangan kurikulum pada dimensi yang mendasar ini perlu pengembangan kurikulum untuk menjawabnya.

Menurut Hamalik (2013: 194) mengatakan bahwa: Pengembangan kurikulum merupakan bagian yang sangat esensial dalam proses pembelajaran mata pelajaran (termasuk PPKn). Ada 4 bagian penting dalam kurikulum meliputi: tujuan, isi/materi, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Semua komponen tersebut saling berkaitan dan berinteraksi untuk mencapai perilaku yang dicita-citakan oleh tujuan mata pelajaran tersebut.

Tujuan yang jelas akan memberi petunjuk yang jelas pula dalam memilih isi/materi yang harus dikuasai, strategi yang akan digunakan serta bentuk dan alat evaluasi yang tepat untuk mengukur ketercapaian kurikulum. Hierarki perumusan

tujuan kurikulum dimulai dari tujuan umum pendidikan, kemudian tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional.

Kemudian dalam rangka mendesain/ pengembangan kurikulum menurut Tafsir (2004: 67) berarti mempertimbangkan nilai-nilai. Nilai-nilai itu pastilah nilai-nilai tertinggi yang diyakini kebenarannya, Lebih tinggi kedudukannya daripada kurikulum itu sendiri. Nilai-nilai itulah sebenarnya yang menentukan rumusan tujuan yang kita buat, sedangkan kurikulum hanyalah alat atau jalan untuk mencapai tujuan itu. Bagi orang Islam, nilai tertinggi yang diyakininya adalah nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits, karena itu keduanya dijadikan landasan teori pendidikan yang kehendaknya. Konsep yang sekarang sedang aktual yaitu pendidikan yang berkarakter. Bagi yang beragama Islam yang berakhlakul karimah atau dengan istilah berpendidikan berbasis Islami.

Juhana (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bandung) mengatakan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung konsep berbasis Islam bermula pada mata pelajaran Agama Islam tahun 1990-an untuk memandu mata pelajaran umum lainnya. Konsep ini terkenal dengan istilah kurikulum integralistik. Di mana nilai-nilai pokok Islam mengintegrasikan diri ke dalam kurikulum (*kajian Subject-centered design*) dan pembelajaran (*Learner-centered design*). Sejalan perkembangan jaman kurikulum integralistik ini, istilah nilai-nilai pokok Islam berubah menjadi “Budi pekerti” yang barometernya pendidikan nilai. Dan pada jaman milenium 4.0 ini dengan istilah “pendidikan berkarakter” yang bermuara pada nawacita di pemerintahan Jokowi Widodo. Pendidikan berkarakter menggali lima nilai karakter utama yang bersumber dari Pancasila. Harapan kami bias terwujud menjadi pendidikan yang berkarakter (pen, berbasis islam/akhlak) (Komunikasi pribadi, 11 Mei 2016).” lima nilai karakter yang menjadi prioritas pengembangan gerakan PPK; yaitu religius, nasionalisme, integralitas, kemandirian, dan kegotong royongan.

Berdasarkan wawancara dan observasi di SMP Negeri Gugus 5 bahwa: Adanya suatu potensi yang layak untuk selaras, serasi dan seimbang nilai-nilai agama (berbasis Islami) bisa menjadi sumber nilai khususnya mata pelajaran PPKn, guru-guru PPKn 100% beragama Islam yang berkwalifikasi dapat

membaca dan menulis al Qur'an (BTQ) dan al Hadits. Dan untuk siswa \pm 98 % beragama Islam melalui pendidikan pembiasaan pelaksanaan BTQ, sholat dhuhur berjamaah, sholat dhuha, ceramah keagamaan dan peringatan hari-hari besar keagamaan serta loba keagamaan sekabupaten. kegiatan ini salah satu bagian yang pokok dari Penguatan revolusi karakter bangsa atau revolusi mental (agenda Nawacita No 8, Gerakan PPK 2010 dan Permendikbud No 23 Tahun 2015) (Komunikasi pribadi, 22 Mei 2017).

Hasil wawancara Dengan Zaenal Arifin (Pengawas Pembina PPKn) mengatakan bahwa yang menjadi alasan siswa-siswi kurang menaruh perhatian kepada mata pelajaran PPKn bukan disebabkan gaya mengajar guru yang kurang menarik, media dan metode yang digunakan monoton serta dalam menerangkan materi guru tidak sesuai dengan kurikulum yang ada, tetapi tidak menghubungkan antara materi pelajaran (Silabus PPKn) dengan masalah- masalah aktual dengan nilai-nilai agama yang menjadi keyakinannya. Berperilaku sesuai dengan tujuan PPKn tapi hanya sekedar budaya, tetapi belum menjadi ruh keyakinan. Maksudnya nampaknya bermoral tapi kosong nilai-nilai ruh agama (krisis teologi) (Komunikasi pribadi, 08 Maret 2017).

Secara umum tujuan mata pelajaran PPKn pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan potensi siswa dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni: (1) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen, dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic commitment, and civic responsibility*); (2) pengetahuan kewarga-negaraan (*civic knowledge*); (3) keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*) (Direktorat Jendral Pendidikan dadasar dan menengah, 2017:12)

Fenomena umum permasalahan yang ditemukan pada Guru PPKn dalam kegiatan pembelajaran hanya sekedar sebagai corong silabus yang syah (Kurikulum PPKn 2013 yang direvisi), belum ada keberanian Guru mengembangkan kurikulumnya mengintegrasikan atau mengkorelasikan nilai-nilai agama Islam masuk ke dalam draf silabus (Kurikulum PPKn). Pengembangan Kurikulum PPKn yang dimaksud berbasis Islam, dalam kajian

Subject-centered design, yaitu desain yang berpusat pada mata pelajaran PPKn berbasis Islam terutama Kompetensi dasar (KD) sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI-1; dan *Learner-centered design*. yaitu desain yang berpusat pada pembelajaran PPKn berbasis Islam KD sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI-1.

Sikap spriritual indikatornya yakni: 1) Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Dasar Negara Pancasila, yaitu 2) Menghargai norma-norma keadilan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa 3) Menghargai nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman 4) Menghormati keberagaman norma-norma, suku, agama, ras dan antargolongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai sesama ciptaan Tuhan, 5) Mensyukuri makna kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat, 6) Menghargai karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa (Direktorat Jendral Pendidikan dadasar dan menengah, 2017: 24).

Persoalan ini merupakan masalah krusial yang harus segera diselesaikan segera untuk melengkapi kurikulum yang ada untuk dikembangkan sesuai dengan situasi lingkungan setempat dengan pola pengembangan kurikulum PPKn yang validitas dan reabilitas teruji, maka Mata Pelajaran PPKn melalui para guru dalam kiprahnya harus dapat merubah pola lama ke pola yang baru dalam mengembangkan kurikulumnya.

Alternatif yang bisa menjawab tentang konsep tersebut yaitu dengan mengembangkan Kurikulum PPKn berbasis Islami. Berbasis artinya berdasar atas nilai-nilai ajaran agama Islam. Alasan apa bahwa Pengembangan Kurikulum PPKn bedasar atas nilai-nilai ajaran agama Islam ? Alim (2006: 10) mengatakan:

Nilai-nilai agama adalah nilai luhur yang ditransfer dan diadopsi ke dalam diri. Oleh karena itu beberapa banyak dan seberapa jauh nilai-nilai agama bisa mempengaruhi dan membentuk sikap serta perilaku seseorang sangat tergantung dari seberapa dalam nilai-nilai agama terinternalisasi di dalam dirinya. Semakin dalam nilai-nilai agama terinternalisasi dalam diri seorang, kepribadian dan sikap religiusnya akan muncul dan terbentuk.

Jika sikap religius sudah mencul dan terbentuk, maka nilai-nilai agama akan menjadi pusat nilai dalam menyikapi segala sesuatu dalam kehidupan.

Lebih lanjut Aryani, (2010: 8) Juga mengatakan:

Pembinaan Imtak peserta didik melalui materi PKn, pada dasarnya merupakan suatu bentuk inovasi pendidikan keagamaan, sebab pendidikan agama dalam nilai agama yang dimaksud model pendidikan berbasis nilai ini, bukan hanya mengajarkan pengetahuan tentang agama, melainkan dapat mengarahkan peserta didik untuk menjadi manusia yang benar-benar mempunyai kualitas keagamaan yang kuat, dan memiliki akhlak mulia. Dengan demikian, nilai agama yang dimaksud dalam model pendidikan berbasis nilai, bukan hanya menjadi pengetahuan, melainkan dapat membentuk sikap dan kepribadian peserta didik, sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa dalam arti sesungguhnya.

Melalui Pemahaman nilai-nilai agama merupakan hak manusia yang paling mendasar dan asasi sehingga dalam pelaksanaannya proses pembelajaran akan lebih mendasar, mendalam, dan mudah dipahami oleh peserta didik.

Diperkuat dalam Q.S al Baqarah, 2: 208 : "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam secara keseluruhan....,"

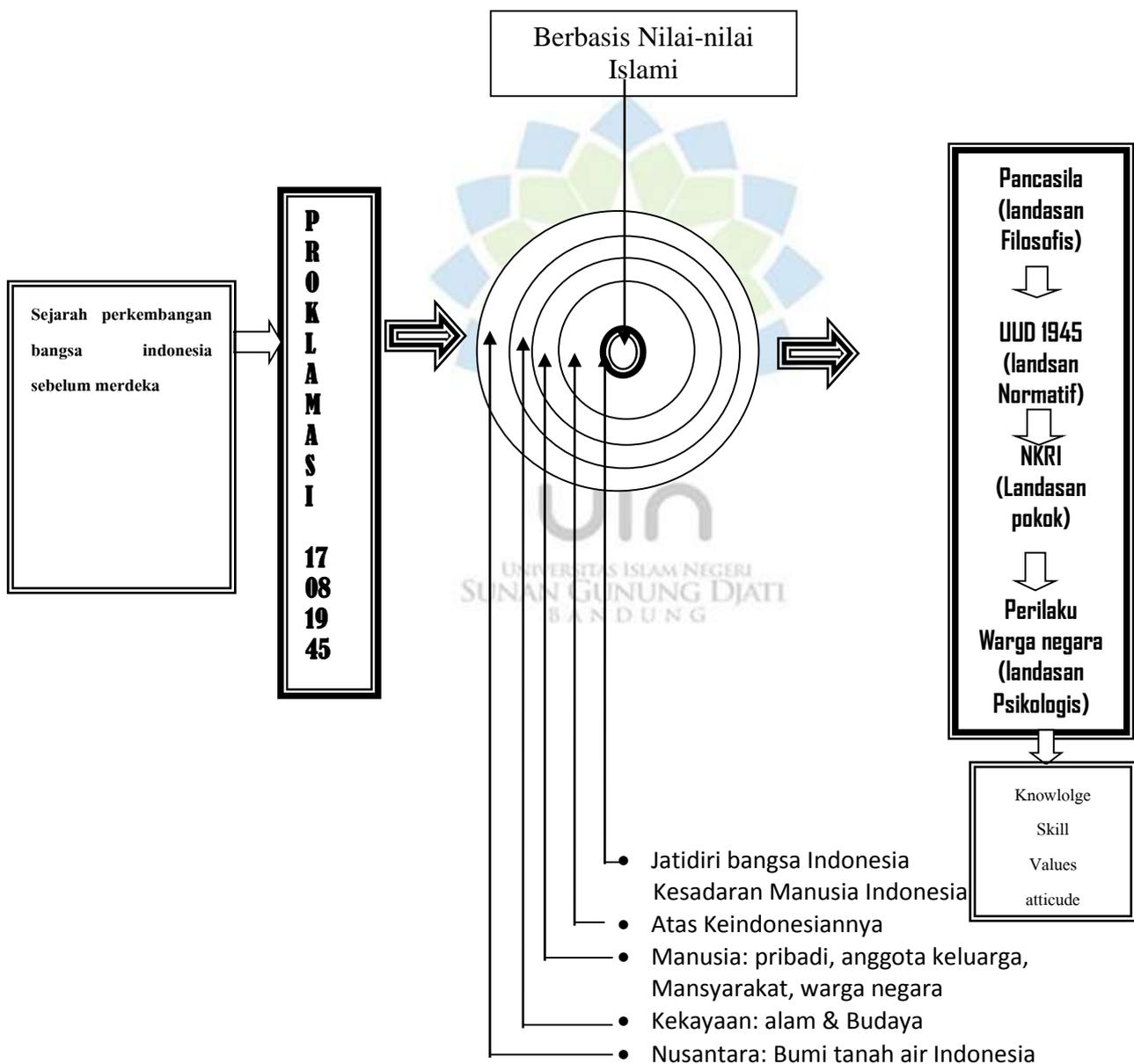
Shihab (2012: 419) mengatakan: Allah memerintahkan yang beriman kepada-Nya dan membenarkan Rasul-Nya agar berpegang kepada tali Islam (ad Din) dan semua syariatnya serta mengamalkan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya dengan segala kemampuan yang dimiliki. Untuk melaksanakan hal ini tentu kita harus memiliki pemahaman akan Islam secara benar. Seperti Keyakinan atas keesaan Allah serta kewajiban mengikhlaskan diri kepadanya serta adalah titik tolak segala kegiatan. Berbuat baik mengandung makna memperlakukan orang lain lebih baik dari perlakuan kepada kita..

Perbuatan yang Islami ini barometernya bersumber dari hati Dalam hal yang tidak nampak hal ini ada dalam hati yang sulit dilihat manusia tapi hanya oleh yang Maha Pencipta, karena barometernya dalam hati ada "niat" beramal, berperilaku, atau aktivitas seseorang. Dalam hal ini niat menjadi tolak ukur sesuatu amalan, diterima atau tidaknya tergantung niat dan banyaknya pahala yang didapat atau sedikitnyapun tergantung niat. Seseorang bisa naik ke derajat

shiddiqin dan bisa jatuh ke derajat yang paling bawah (*afalan safiliin*) disebabkan karena niatnya. Sesuai dengan hadits Nabi S.A.W:

Untuk lebih jelas penulis menambah “suatu konsep” bagan dari Wahab dan Sapriya (2015: 86) tentang ontologi PPKn, meletakkan “Berbasis Nilai-nilai Islami” di tengah atas adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Ontologi PPKn Berbasis Nilai-nilai Islami



Hal ini jelas akan memberikan warna ruh ke dalam pengembangan Kurikulum PPKn baik ke dalam *Subject-centered design*, yaitu desain yang perpusat pada mata pelajaran (PPKn) dan *Learner-centered design*, yaitu desain yang berpusat pada pembelajaran (PPKn).

Gagasan ini tidak saja diharapkan bisa menjadi solusi, tetapi lebih dari itu, gagasan yang meuncul harus mampu membawa bangsa yang besar ini bangkit untuk maju. Maju dalam memenangkan persaingan di masa mendatang. Baik dalam dunia pendidikan umumnya dan PPKn pada khususnya melalui lembaga-lembaga pendidikan formal secara struktural menyiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang menjadi penunjang gagasan tersebut. jika masyarakat Indonesia ingin memiliki karakter kewarganegaraan yang kuat berperan sebagai khalifatul fil ardh untuk memakmurkan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, maka mereka harus memiliki kekuatan ideologi dan spritual teologi yang mendasar.

Dengan demikian terdapat beberapa keharusan dan tuntutan terhadap Pendidikan Kewarganegaraam dalam mengembangkan kompetensi di era global, baik dalam kajran tutuluhan dan pengembangan Kurikulum PPKn serta mengkaitkan dengan nilai-nilai ajaran Agama Islam sebagai agama mayoritas. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka perlu diadakan suatu penelitian ilmiah mengkaji Pengembangan Kurikulum PPKn Berbasis Islami dalam mengembangkan kopetensi PPKn. Kurikulum PPKn yang berbasis Islami bisa menumbuhkan kecerdasan intelektual, spiritual, kreativitas, rasa percaya diri, dan peka terhadap lingkungan sekitar. Dalam era sekarang ini agama sangat berperan penting dalam membentengr individu, karena dengan jaman semakin maju tentunya semakin banyak tantangan hidup yang akan menggerus agama dalam diri seseorang. Sehingga pelajaran umum saja dirasa belum cukup untuk membekali individu dalam menjalani hidup.

Dengan dimasukkannya siswa pada lembaga pendidikan yang menggunakan kurikulum PPKn berbasis Islami tentunya akan mendapat dua kebaikan sekaligus pembelajarannya dan pendidikan akhlak. Keduanya terintegrasi secara utuh dengan pembiasaan pembelajaran yang kondisikan oleh

guru untuk siswa. Dengan adanya pengembangan kurikulum PPKn berbasis Islam yang membawa siswa ke ranah kurikulum PPKn yang menjadi ciri khasnya dan dengan ada internalisasi nilai-nilai ajaran agama Islam sebagai ruhnya, sehingga siswa dapat bersikap, berperilaku dan berpikir secara nalar dengan penuh keyakinan sebagai warga negara NKRI yang baik.

Berkaitan dengan konteks di atas, penulis menindak lanjuti untuk meneliti deskriptif analisis terhadap penerapan Kurikulum PPKn berbasis Nilai-nilai Islam Pada SMP negeri Gugus 5 Kab. Bandung yang disinyalir kurikulum yang paling efektif, efisien dan produktif untuk mencapai tujuannya.

Ada beberapa alasan kenapa penulis melaksanakan penelitian Kurikulum PPKn berbasis Nilai-nilai Islami pada SMPN 1 Cileunyi, SMPN 2 Cimenyan dan SMPN 1 Cilengkrang di Gugus 5 Kab. Bandung, pertama, melihat data-data profil sekolah tersebut ada skeptis bagi penulis untuk dineliti, sehingga menggugah peneliti untuk memepelajari lebih dalam lagi sesuai dengan judul penelitian tersebut. kedua, beberapa tahun terakhir ini Pengembangan Kurikulum PPKn berbasis nilai-nilai Islami di SMPN Gugus 5 Kab. Bandung baru wacana dan perlu ditindaklanjuti yaitu dalam *Subject-centered design*, yaitu desain yang berpusat pada mata pelajaran (PPKn) dan dalam *Learner-centered design*, yaitu desain yang berpusat pada pembelajaran (PPKn), ketiga, belum adanya penelitian yang sama tentang model kurikulum PPKn berbasis nilai-nilai Islami, khususnya di Gugus 5 SMPN Kab. Bandung, keempat, masih sedikitnya paru ahli PPKn yang mengungkapkan teori tentang pengembangan kurikulum berbasis nilai-nilai Islam, walaupun ada masih macana.

Penulis melihat Fenomena tersebut selanjutnya untuk dilakukan kajian pemikiran tentang penelitian disertasi dengan judul “Kurikulum PPKn Berbasis nilai-nilai Islami” (Penelitian pada SMPN 1 Cileunyi, SMPN 2 Cimenyan dan SMPN1 Cilengkrang di Gugus 5 Kab. Bandung).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalahnya yaitu “Jika kurikulum PPKn berbasis nilai-nilai Islami

dikembangkan maka siswa akan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam (Penelitian pada SMPN 1 Cileunyi, SMPN 2 Cimenyan dan SMPN 1 Cilengkrang di Gugus 5 Kab. Bandung)” Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diturunkan ke dalam pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimana kondisi objektif Kurikulum PPKn pada SMPN 1 Cileunyi, SMPN 2 Cimenyan dan SMPN 1 Cilengkrang di Gugus 5 Kab. Bandung tersebut?
2. Bagaimana Kurikulum PPKn berbasis nilai-nilai Islami pada SMPN 1 Cileunyi, SMPN 2 Cimenyan dan SMPN 1 Cilengkrang di Gugus 5 Kab. Bandung tersebut?
3. Bagaimana Implementasi Kurikulum PPKn berbasis nilai-nilai Islami pada SMPN 1 Cileunyi, SMPN 2 Cimenyan dan SMPN 1 Cilengkrang di Gugus 5 Kab. Bandung tersebut?
4. Bagaimana dampak kurikulum PPKn berbasis nilai-nilai Islami pada SMPN 1 Cileunyi, SMPN 2 Cimenyan dan SMPN 1 Cilengkrang di Gugus 5 Kab. Bandung tersebut?
5. Apa problem dan alternatif solusi dari kurikulum PPKn berbasis nilai Islami pada SMPN 1 Cileunyi, SMPN 2 Cimenyan dan SMPN 1 Cilengkrang di Gugus 5 Kab. Bandung tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum Penelitian ini adalah mengetahui kurikulum PPKn berbasis Nilai-nilai Islami yang siswanya dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam pada SMPN 1 Cileunyi, SMPN 2 Cimenyan dan SMPN 1 Cilengkrang di Gugus 5 Kab. Bandung.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan khusus penelitian ini mengetahui dan menganalisis tentang:

- a. Kondisi objektif Kurikulum PPKn pada pada SMPN 1 Cileunyi, SMPN 2 Cimenyan dan SMPN 1 Cilengkrang di Gugus 5 Kab. Bandung tersebut.
- b. Kurikulum PPKn berbasis nilai-nilai Islami pada SMPN 1 Cileunyi, SMPN 2 Cimenyan dan SMPN 1 Cilengkrang di Gugus 5 Kab. Bandung tersebut.
- c. Implementasi Kurikulum PPKn berbasis nilai-nilai Islami pada SMPN 1 Cileunyi, SMPN 2 Cimenyan dan SMPN 1 Cilengkrang di Gugus 5 Kab. Bandung tersebut.
- d. Dampak Kurikulum PPKn berbasis nilai-nilai Islami pada SMPN 1 Cileunyi, SMPN 2 Cimenyan dan SMPN 1 Cilengkrang di Gugus 5 Kab. Bandung tersebut
- e. Problem dan alternatif solusi dari Kurikulum PPKn berbasis Nilai-nilai Islami pada SMPN 1 Cileunyi, SMPN 2 Cimenyan dan SMPN 1 Cilengkrang di Gugus 5 Kab. Bandung tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ada dua, yakni manfaat secara teoretis dan praktis:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan berbasis Nilai-nilai Islami pada Kurikulum 2013 pada SMPN 1 Cileunyi, SMPN 2 Cimenyan dan SMPN 1 Cilengkrang di Gugus 5 Kab. Bandung.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi khalayak, terutama bagi:

a. Bagi Sekolah,

Temuan-temuan penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kurikulum sekolah secara makro dan mikro. kemampuan profesionalisme dalam menyelenggarakan model Kurikulum PPKn berbasis nilai-nilai Islami

pada SMPN 1 Cileunyi, SMPN 2 Cimenyan dan SMPN 1 Cilengkrang di Gugus 5 Kab. Bandung tersebut.

b. Bagi Guru,

Temuan-temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk memperbaiki mutu kurikulum nilai-moral (akhlak) dan norma khususnya materi Pendidikan penguatan karakter sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 yang Islami pada SMPN 1 Cileunyi, SMPN 2 Cimenyan dan SMPN 1 Cilengkrang di Gugus 5 Kab. Bandung tersebut.

c. Bagi Siswa,

Temuan-temuan penelitian ini nantinya bisa diaplikasikan di kelas dan diluar kelas supaya hidup yang Islami pada SMPN 1 Cileunyi, SMPN 2 Cimenyan dan SMPN 1 Cilengkrang di Gugus 5 Kab. Bandung tersebut.

d. Bagi peneliti berikutnya,

Temuan-temuan penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan kurikulum PPkn berbasis nilai-nilai Islami SMP Negeri pada umumnya dan khususnya pada SMPN 1 Cileunyi, SMPN 2 Cimenyan dan SMPN 1 Cilengkrang di Gugus 5 Kab. Bandung tersebut.

E. Kerangka Berpikir

Ada tiga dimensi dalam pendidikan yang sangat penting dan sekian banyak dimensi dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu Kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Arifin, 2003: 36).

Idi (1999:3) mengatakan Kurikulum merupakan alat yang sangat penting dalam keberhasilan suatu pendidikan, tanpa adanya kurikulum yang baik dan tepat, maka akan sulit dalam mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang dicita-

citakan. Kurikulum merupakan penjabaran tujuan pendidikan yang menjadi landasan program pembelajaran.(Sutapranata dan Hayya, 2004: 1). Oemar Hamalik mengutip pendapat Romine (1954) yang merumuskannya sebagai berikut: *“Curriculum is interpreted to mean all of the organized courses, activities, and experiences which pupils have under direction of the school, whether in the classroom or not”* (Hamalik: 12)

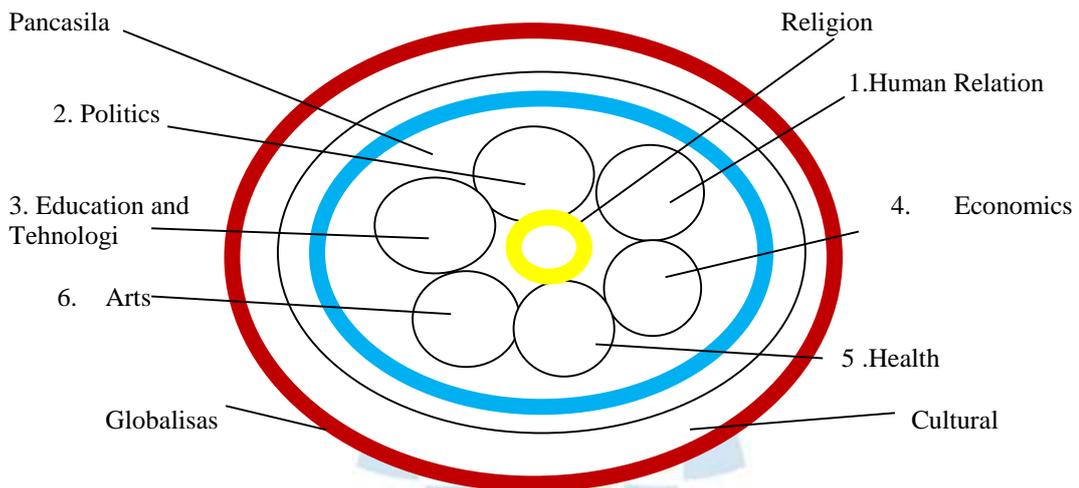
Permasalahan dalam penelitian ini pada Desain Pengembangan Kurikulum PPKn Berbasis Islami di Sekolah Menengah Pertama (Pada SMP Gugus 5 Kab. Bandung) yang meliputi desain, tujuan, implementasi, evaluasi, problematikan dan solusi alternatif yang sesuai dengan tujuan PPKn pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama kurikulum 2013 yang direvisi.

Pengembangan Kurikulum PPKn berbasis Islam jenjang Sekolah Menengah Pertama di Gugus 5 Kab. Bandung yang meliputi kondisi obyektif, desain, implementasi, evaluasi, dan keunggulan serta keterbatasannya yang sesuai dengan tujuan PPKn pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama kurikulum 2013 yang direvisi.

Pengembangan isi kurikulum PPKn ini secara global ada enam komponen yang mendasari kehidupan manusia Indonesia yang seyogyanya menjadi acuan di manusia dalam kehidupan diri, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, di bawah ini payung nilai agama dan budaya. Hal ini akan menjadi fondasi dasar nilai-nilai kegiatan manusia, yakni: 1) nilai kemanusiaan atau humanisme, yakni sistem nilai di mana manusia merupakan makhluk sosial, manusia sama, dan sederajat, sehingga hendaknya saling menghargai setiap pribadi 2) nilai iptek; 3) nilai politik, yang terdiri kebangsaan atau nasionalisme, nilai persatuan dan kesatuan yang ada pada jiwa seseorang dalam hidup berbangsa dan bernegara, dan nilai musyawarah/demokrasi yang merupakan tatanan system nilai di mana manusia hidup bermasyarakat hanya dapat memecahkan masalah dan memutuskan suatu keputusan bersama dengan musyawarah, bukan pendapat individu atau kelompok; 4) nilai ekonomi, 5) nilai kesehatan; dan 6) nilai seni. Aryani dan Susatim, (2010: 93)

Keenam nilai tersebut harus dilandasi dengan suatu kesadaran , serta dasar mental religius kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu nilai agama (Imtak) dan Budaya (dinamika sistem nilai):

Gambar 1.2
Education in the Culture a model (Brameld, 1965. 15)



Nilai religius atau nilai agama secara hakiki merupakan nilai yang memiliki dasar kebenaran paling kuat, karena bersumber dari kebenaran tertinggi yang datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Dasar fundamental nilai dapat memantapkan keimanan seseorang untuk mengabdikan kepada Allah swt dengan tujuan menyatukan jiwa manusia dengan Pencipta-Nya

Nilai agama, di samping nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari, menjadi fondasi atau tonggak bagi seseorang dalam melakukan semua kegiatan kehidupan. Tanpa dilandasi nilai agama, setinggi apapun intelektual seseorang, dia akan menjadi buta dan tidak mengetahui apa yang harus ia lakukan di muka bumi ini. Aryani dan Susatim, (2010: 93)

Nilai agama, dalam hal ini agama Islam, adalah ajaran yang mendunia dan bermakna masa depan, yang dalam pelaksanaannya memerlukan penyesuaian dengan kehidupan di dunia, di mana dan kapan manusia itu hidup. Manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk universal, bersuku-suku, dan

berbangsa-bangsa supaya saling sayang menyayangi, dan makhluk pribadi yang hakiki untuk mengabdikan kepada-Nya. Pengabdian itu secara esensial berbentuk aplikasi maneladani ilmu. Itu sebabnya, iman dan ilmu yang diperoleh dari nilai agama akan dapat menyentuh seluruh aspek kehidupan di dunia ini, termasuk masalah pendidikan.

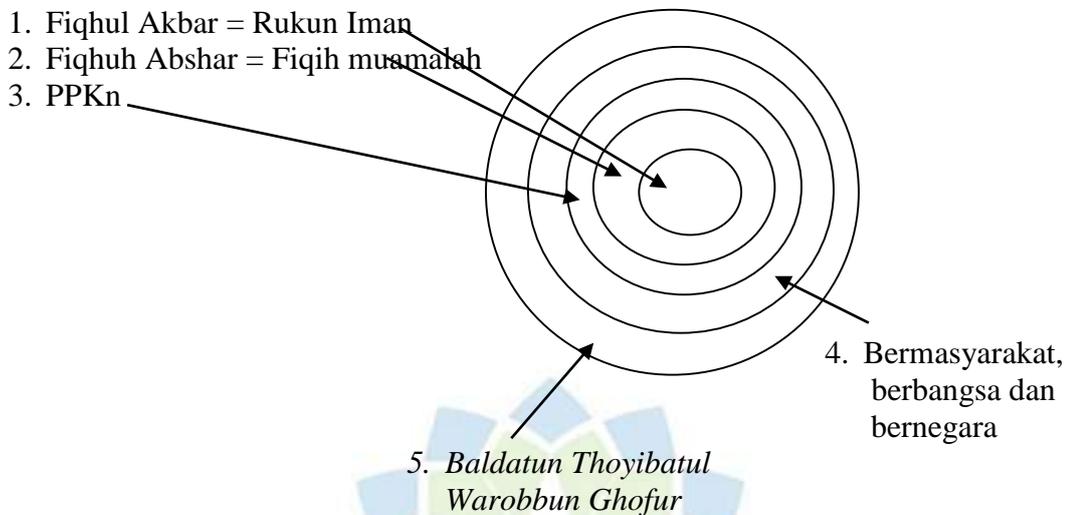
Nilai religius atau nilai agama secara hakiki merupakan nilai yang memiliki dasar kebenaran paling kuat, karena bersumber dari kebenaran tertinggi yang datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Dasar fundamental nilai dapat memantapkan keimanan seseorang untuk mengabdikan kepada Allah swt dengan tujuan menyatukan jiwa manusia dengan Pencipta-Nya

Nilai agama, di samping nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari, menjadi fondasi atau tonggak bagi seseorang dalam melakukan semua kegiatan kehidupan. Tanpa dilandasi nilai agama, setinggi apapun intelektual seseorang, dia akan menjadi buta dan tidak mengetahui apa yang harus ia lakukan di muka bumi ini. Aryani dan Susatim. (2010: 8)

Nilai agama, dalam hal ini agama Islam, adalah ajaran yang mendunia dan bermakna masa depan, yang dalam pelaksanaannya memerlukan penyesuaian dengan dunia, di mana dan kapan manusia itu hidup. Manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk universal, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa supaya saling sayang menyayangi, dan makhluk pribadi yang hakiki untuk mengabdikan kepada-Nya. Pengabdian itu secara esensial berbentuk aplikasi Maneladani ilmu. Itu sebabnya, iman dan ilmu yang diperoleh dari nilai agama akan dapat menyentuh seluruh aspek kehidupan di dunia ini, termasuk masalah Pendidikan.

Untuk lebih jelasnya lihat bagan Paradigma Model Kurikulum PPKn berbasis nilai-nilai Islami:

Gambar 1.3
Paradigma Model Kurikulum PPKn
Berbasis Nilai-nilai Islam



(Komunikasi Pribadi, Afif Muhammad, M.A., 17 Mei 2016)

Pembinaan Intak peserta didik melalui materi PKn, pada dasarnya merupakan suatu bentuk inovasi pendidikan keagamaan, sebab pendidikan agama dalam nilai agama yang dimaksud model pendidikan berbasis nilai ini, bukan hanya mengajarkan pengetahuan tentang agama, melainkan dapat mengarahkan peserta didik untuk menjadi manusia yang benar-benar mempunyai kualitas keagamaan yang kuat, dan memiliki akhlak mulia. Dengan demikian, nilai agama yang dimaksud dalam model pendidikan berbasis nilai, bukan hanya menjadi pengetahuan, melainkan dapat membentuk sikap dan kepribadian peserta didik, sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa dalam arti sesungguhnya. Aryani dan Susatim, (2010: 93)

Muhaimin (1993:144) mengatakan, bahwa fungsi diterapkannya nilai – nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, yakni: 1) alat untuk memelihara, memperluas, dan menghubungkan tingkat-tingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial, serta ide-ide masyarakat dan nasional; 2) alat untuk mengadakan perubahan, inovasi, dan pengembangan, yang secara garis besarnya melalui

pengetahuandan skill yang baru ditemukan, dan melatih tenaga-tenaga manusia yang produktif untuk menemukan perimbangan perubahan sosial dan ekonomi.

Islam adalah doktrin agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya melalui para rasul. Dalam Islam memuat sejumlah ajaran, yang tidak sebatas pada aspek ritual saja, tetapi juga mencakup aspek peradaban. Dengan misi utama sebagai *rahmatan lil 'alamin*, Islam hadir dengan menyuguhkan tata nilai yang bersifat plural dan inklusif yang menambah ke dalam semua ranah kehidupan. Para ahli dari semua kalangan berusaha menerjemahkan dan menikmati perjamuan' Islam menurut disiplin ilmu masing-masing. Tentu saja bagi para pendidik, praktisi pendidikan dan teoritikus pendidikan lebih cara menikmati hidangan itu dalam suguhan yang dikemas dalam bentuk pendidikan. Mujib (2010: xii)

Islam adalah agama kepatuhan, kebersihan dari cacat, dan perdamaian untuk memperoleh keselamatan dunia akhirat. Hal itu didasarkan atas arti harfiah Islam yang seakar dengan (1) *al-salam* ;berarti menyerah diri, kepasrahan, ketundukan, dan kepatuhan, (2) *al-silm* dan *al-salm* ; berarti dama dan aman ; dan (3) *al-salm* dan *al-salamah*; berarti bersih dan selamat dari cacat, baik lahir maupun batin. Orang yang berislam (muslim) adalah orang menyerah, tunduk, patuh dalam melakukan perilaku yang baik, agar hidupnya bersih lahir dan batin yang ada pada gilirannya akan mendapatkan keselamatan dan kedamaian hidup di dunia maupun akhirat. (Mujib, 2010: xii)

Dasar yang ditetapkan berdasarkan nilai-nilai ilahi yang tertuang dalam al Qur'an maupun sunnah, karena kedua kitab tersebut merupakan nilai kebenaran yang universal, abadi dan bersifat futuristik. Di Dalam Hadits nabi Muhammad S.A.W berpesan jangan meninggalkan kedua landasan tersebut.

Sabda nabi:

تَرَكَتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمُ بِهِمَا : كِتَابٌ وَ سُنَّةٌ رَسُولِيهِ

“sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kamu, yang jika kamu berpegang teguh keduanya, maka kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yakni Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya” (HR.Hakim)

Disamping kedua sumber itu, masih ada sumber yang lain, yaitu dasar yang bersumber dari dalil ijtihadi, suatu hasil pemikiran manusia yang tidak berlawanan dengan jiwa dan semangat Al-Qu'ran dan As-Sunnah. Dalil ijtihadi dapat berupa *ijma'* (consensus para ulama), *qiyas* (analogi), *istihsan*, *istishhab*, *mashalih al-mursalah*, *madzhab shahabi*, *sadzdz al-dza'riah*, *syar'u man qablana* dan *'uruf*.

Setiap orang Islam pada hakekatnya adalah insan agama yang bercita-cita berpikir, beramal untuk hidup akhiratnya, berdasarkan atas petunjuk dari wahyu Allah melalui Rasulullah. Kecendungan hidup keagamaan ini merupakan ruhnya. Agama yang benar berkembangnya dipimpin oleh ajaran Islam yang murni, bersumber pada kitab suci serta menerangkan tentang perkara benar (hak), tentang tugas kewajiban manusia untuk mengikuti yang benar itu. Menjauhi yang batil dan sesat atau mungkar yang kesemuanya telah diwujudkan dalam syariat agama yang berdasarkan nilai-nilai mutlak dan norma-normanya telah ditetapkan oleh Allah yang tak berubah-ubah menurut selera nafsu manusia oleh karena itu, tujuan pendidikan Islam penuh dengan nilai rohaniyah islam dan berorientasi kepada kebahagiaan hidup di akhirat. Tujuan itu difokuskan pada pembentukan pribadi muslim yang sanggup melaksanakan syariat Islam melalui proses pendidikan spiritual menuju makrifat kepada Allah. (Arifin, 1989:56-57)

Berdasarkan uraian di atas dapat dibuat sekurang-kurangnya kesimpulan berikut:

1. Pelaksanaan pendidikan keiman dan ketakwaan merupakan pelaksanaan dari perintah Pancasila, dan UU Nomor 20 Tahun 2003.
2. Pendidikan keimanan dan ketakwaan itu adalah system pendidikan nasional.
3. Karena pendidikan keimanan dan ketakwaan merupakan *core sisystem* pendidikan nasional maka pendidikan keimanan dan ketakwaan itu merupakan tugas keimanan dan ketakwaan itu merupakan tugas kepala sekolah, guru agama, semua guru semua aparat sekolah, orang tua murid, dan intansi terkait.

4. Guru agama hanya memikul sebagian saja dari tugas pendidikan keimanan dan ketakwaan, terutama segi pengetahuan dan ketrampilan melaksanakan ajaran agama.
5. Posisi pendidikan keimanan dan ketakwaan itu tidaklah sejajar dengan mata pelajaran lain, ia berada atas mata pelajaran dan berfungsi sebagai core, yang sejajar dengan mata-mata pelajaran lain dan ketakwaan yang menjadi tugas sama dan ada mata pelajaran agama yang menjadi tugas guru agama. Tafsir,(2010:162-163)

Hamalik (2013:194) mendefinisikan desain kurikulum adalah sebagai rencana atau susunan dari unsur-unsur kurikulum yang terdiri atas tujuan, isi, pengalaman belajar, dan evaluasi. Salah satu karakteristik penting dari pengembangan kurikulum PPKn berbasis Islam adalah konseptualisasi dan organisasi berbagai bagian dari kurikulum tersebut dengan nilai-nilai Islam. Dalam Model kurikulum ini menurut dasar-dasar pengkategorikan sebagai berikut (Hamalik,2013:194):

1. *Subject-centered design*, yaitu desain yang berpusat pada mata pelajaran (PPKn)
2. *Learner-centered design*, yaitu desain yang berpusat pada pembelajaran (PPKn); dan
3. *Problem-centered design*, yaitu yang berpusat pada permasalahan.

Masing –masing komponen desain tersebut dikembangkan menjadi suatu rancangan kurikulum yang memuat unsure-unsur pokok kurikulum yaitu tujuan, isi, pengalaman belajar, dan evaluasi PPKn yang sesuai dengan inti Model kurikulum PPKn berbasis islami tersebut.

Diilustrasikan ke dalam gambar berikut ini:

Gambar 1.3
Bagan Pengembangan Kurikulum PPKn

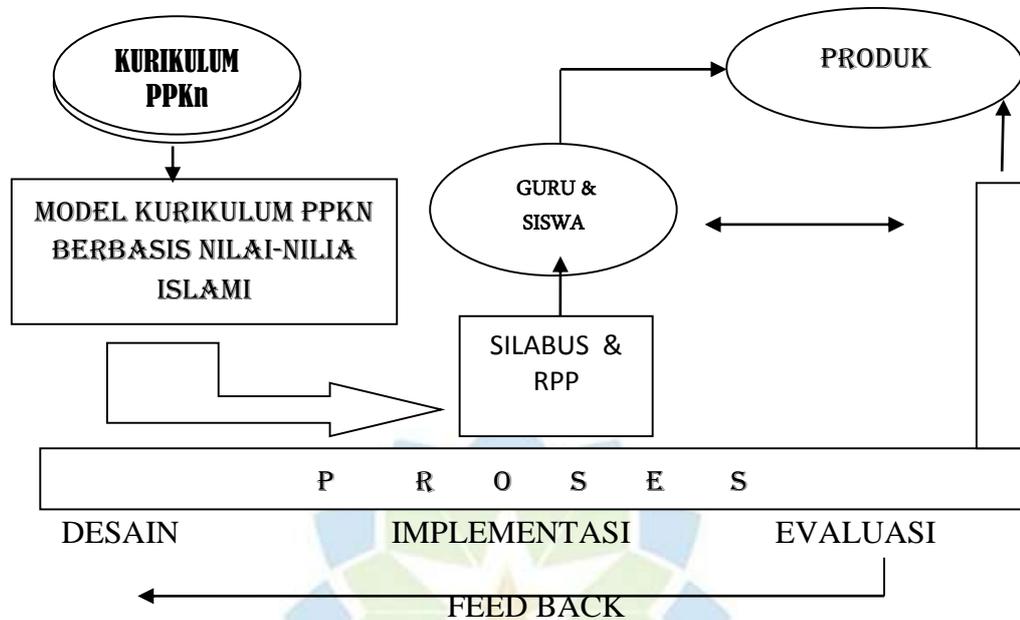


Chart tersebut menggambarkan bahwa dalam mengembangkan kurikulum harus dimulai dari kegiatan perencanaan kurikulum. Dalam menyusun perencanaan ini didahului oleh ide-ide yang akan dituangkan dan dikembangkan dalam program:

1. Visi yang di canangkan
Visi (vision) adalah *the statement of ideas or hopes*, yakni pernyataan tentang cita-cita atau harapan-harapan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pendidikan dalam jangka.
2. Kebutuhan *stakeholders* (siswa, masyarakat, pengguna lulusan), dan kebutuhan untuk studi lanjut.
3. Hasil evaluasi kurikulum sebelumnya dan tuntutan perkembangan ipteks dan zaman
4. Pandangan-pandangan para pakar dengan latar belakangnya
5. Kecenderungan era globalisasi, yang menuntut seseorang untuk memiliki etos belajar sepanjang hayat, melek social, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi

Kelima ide tersebut diramu sedemikian rupa untuk dikembangkan dalam program atau kurikulum sebagai dokumen, yang antara lain berisi: informasi dan jenis dokumen yang di hasilkan; format silabus; dan komponen-komponen kurikulum yang harus dikembangkan. Apa yang tertuang dalam dokumen tersebut kemudian dikembangkan dan disosialisasikan dalam proses pelaksanaannya, yang dapat berupa pengembangan kurikulum dalam bentuk satuan acara pembelajaran atau SAP, proses pembelajaran di kelas atau di luar kelas, serta evaluasi pembelajaran, sehingga di ketahui tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Dari evaluasi ini akan diperoleh umpan balik (*feedback*) untuk digunakan dalam penyempurnaan kurikulum berikutnya. Dengan demikian, proses pengembangan kurikulum menuntut adanya evaluasi secara berkelanjutan mulai dari perencanaan, implementasi hingga evaluasinya itu sendiri.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian Model Kurikulum PPKn Berbasis nilai-nilai Islami pada Sekolah Menengah Pertama dalam dunia sistem pendidikan di Indonesia masih hal baru. Munculnya pengembangan kurikulum berbasis nilai-nilai Islami dipicu oleh situasi dan kondisi profil sekolah di Gugus 5 cenderung agamis dalam pengamalan kehidupan sehari-hari di sekolah. Di lain pihak eksternal yang semakin mengglobal dan informasi yang begitu cepat pada gilirannya mempengaruhi konsep, nilai, norma dan moral bisa terjadi menaikkan dan turunnya (degradasi nilai). Bahkan sampai kepada isme-isme konservatif dan ideologi mengglobal sehingga suatu bangsa jika ingin bertahan dan maju harus dapat menyiasati.

Untuk menyiasati sistem pendidikan Indonesia agar tercapai tujuan nasional dan tujuan pendidikan nasional melalui mata pelajaran PPKn, salah satunya membuat Model Kurikulum PPKn Berbasis Nilai-nilai Islami pada Sekolah Menengah Pertama. Berbasis Nilai-nilai Islami tersebut konsep dan sikap disifati nilai-nilai, norma dan moral (akhlak) yang berdasarkan nilai-nilai Islam sebagai Sumber dasarnya.

Berdasarkan wawancara dengan Setiawan sebagai ketua gugus di SMP Negeri Gugus 5 Kab. Bandung bahwa: Adanya suatu potensi yang layak untuk

selaras, serasi dan seimbang nilai-nilai agama (berbasis Islam) bisa sumber nilai khususnya mata pelajaran PPKn, guru-guru PPKn 100% beragama Islam yang berkwalifikasi dapat membaca dan menulis al Qur'an (BTQ) dan al Hadits. Dan untuk siswa ± 98 % beragama Islam melalui pendidikan pembiasaan pelaksanaan BTQ, sholat dhuhur berjamaah, sholat dhuha, ceramah keagamaan dan peringatan hari-hari besar keagamaan serta loba keagamaan sekabupaten. kegiatan ini salah satu bagian yang pokok dari Penguatan revolusi karakter bangsa atau revolusi mental (agenda Nawacita no 8, Gerakan PPK 2010 dan Permendikbud No 23 Tahun 2015) (Komunikasi pribadi, 22 Mei 2017)

Hasil wawancara dengan Zaenal Arifin (Pengawas Pembina PPKn) mengatakan bahwa yang menjadi alasan siswa-siswi kurang menaruh perhatian kepada mata pelajaran PPKn bukan disebabkan gaya mengajar guru yang kurang menarik, media dan metode yang digunakan monoton serta dalam menerangkan materi guru tidak sesuai dengan kurikulum yang ada, tetapi tidak menghubungkan antara materi pelajaran (Silabus PPKn) dengan masalah- masalah aktual dengan nilai-nilai agama yang menjadi keyakinannya. Berperilaku sesuai dengan tujuan PPKn tapi hanya sekedar budaya, tetapi belum menjadi ruh keyakinan. Maksudnya nampaknya bermoral tapi kosong nilai-nilai ruh agama (krisis teologi) (Komunikasi pribadi, 08 Maret 2017)

Nilai- nilai dibutuhkan nilai yang universal yang lebih tinggi dari kurikulum itu sendiri seperti apa yang dikatakan Tafsir (2004: 67) dalam rangka mendesain/ pengembangan kurikulum dibutuhkan mempertimbangkan nilai-nilai. Nilai-nilai itu pastilah nilai-nilai tertinggi yang diyakini kebenarannya, Lebih tinggi kedudukannya daripada kurikulum itu sendiri. Nilai-nilai itulah sebenarnya yang menentukan rumusan tujuan yang kita buat, sedangkan kurikulum hanyalah alat atau jalan untuk mencapai tujuan itu. Bagi orang Islam, nilai tertinggi yang diyakininya adalah nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits, karena itu keduanya dijadikan landasan teori pendidikan yang kehendaknya

Dalam hal ini nilai-nilai Islam tidak nampak ada dalam hati yang sulit dilihat manusia tapi hanya oleh yang Maha Pencipta, karena barometernya dalam hati ada "niat" beramal, berperilaku, atau aktivitas seseorang. Dalam hal ini niat

menjadi tolak ukur sesuatu amalan, diterima atau tidaknya tergantung niat dan banyaknya pahala yang didapat atau sedikitnyapun tergantung niat. Seseorang bisa naik ke derajat *shiddiqin* dan bisa jatuh ke derajat yang paling bawah (*afalan safiliin*) disebabkan karena niatnya. Sesuai dengan hadits Nabi S.A.W:

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Dari Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah.” (HR. Bukhari, Muslim, dan empat imam Ahli Hadits) Sumber:

Nilai-nilai didasarkan berdasar sumber seseorang yang paling dalam yaitu keyakinan. Keyakinan bersumber dari *fiqul akbar/ tauhid/ spiritual* yang menjadi dasar *fiqul absor/fiqih ibadah*.

Konsep PPKn berbasis Nilai-nilai Islami menurut pengetahuan penulis dalam hasanan studi pustaka adalah hal yang baru dan aktual perlu dikaji lebih dalam. Jika kita perhatikan dalam dunia akademisi dan perpustakaan masih bersifat umum, tapi jika menggunakan konsep PPKn berbasis Nilai-nilai variabel yang lain itu ditemukannya banyak.

1. Hasil penelitian Ilmiah

Penulis menemukan sebagian dari penelitian PPKn dengan variabel lain, adalah antara lain:

- a. Nurul Zuriah, (2011: iii ttd) dalam Disertasinya mengatakan: Hasil penelitian pengujian model ini menemukan dan menunjukkan bahwa model Pkn Multukultural berbasis kearifan lokal lebih efektif dalam meningkatkan kompetensi pebelajaran konvensional. Secara spesifik, model pembelajaran Pkn Multukulturalisme Berbasis Kearifan lokal (MBKI), pada kelompok kelas eksperimen, menunjukkan kompetensi kewarganegaraannya lebih tinggi di banding kelompok kelas control dengan model pembelajaran Pkn

konvensional dengan harga F sebesar 4.585 yang memiliki signifikansi lebih kecil dari 0,05 secara substansial hasil ini menunjukkan bahwa Pkn MBKI efektif untuk meningkatkan kompetensi multikultural mahasiswa. Di samping itu penerapan Pkn MBKI juga memberikan pengaruh yang positif terhadap aktivitas, motivasi belajar, dan dampak pengiring lainnya.

- b. Supriadi, (2010:iii ttd) dalam Disertasinya mengatakan hasil temuan dalam penelitian ini adalah. 1)Perencanaan pembelajaran yang berupa kontrak perkuliahan disusun secara mandiri oleh dosen Pkn MKU Universitas Riau, internalisasi aspek sikap sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran berdasarkan kurikulum berbasis KKNi belum terlalu muncul didalam komponen-komponen kontrak perkuliahan. 2) Proses pembelajaran pendidikan telah mencerminkan karakteristik proses pembelajaran yang berupaya untuk menginternalisasikan aspek sikap kedalamnya. 3)Proses penilaian sikap yang dilakukan oleh dosen Pkn MKU Universitas Riau cukup baik, dalam rangka meningkatkan watak kewarganegaraan (*civic deposition*) mahasiswa. 4) Kendala yang dihadapi oleh dosen Pkn MKU meliputi perencanaan , proses , dan penilaian pembelajaran dengan upaya yang dilakukan ialah mengikuti seminar dan pelatihan. 5) Pembelajaran yang dilaksanakan mampu meningkatkan watak kewarganegaraan (*civic deposition*) mahasiswa. Rekomendasi ditujukan kepada dosen Pkn Universitas, Pemerintah, dan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan pembelajaran yang berdasarkan kurikulum berbasis KKNi dalam meningkatkan watak kewarganegaraan mahasiswa.
- c. Ella Dewi Latifah, (2008: iii ttd) dalam disertasinya mengatakan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa guru PKn di haruskan untuk (1) Memahami teknologi terkini (2) Memanfaatkan media ICT dalam pembelajaran baik berupa penggunaan infocus, e-learning, Edmodo (3)Memfasilitasi siswa untuk mengerjakan tugas melalui media internet, email, dan facebook (4) Mengupload soal UJON (5) Membuat materi presentasi *power point* (6) Menguasai media ICT yang difasilitasi oleh sekolah (7) serta memahami karakteristik media ICT. Selain itu siswa pun diwajibkan memiliki

kemampuan dan kompetensi yang sama dengan guru dalam memanfaatkan media ICT. Fasilitas media ICT yang digunakan untuk menunjang pembelajaran Pkn antara lain : *e-learning, edmodo, infocus*, aplikasi internet dan are *hotspot*. Sistem ujian meliputi kegiatan : Mempersiapkan proses pembelajaran dan media, pelaksanaan pembelajaran Pkn berlangsung dalam kelas dengan menggunakan media ICT, Evaluasi melalui proses penilaian berbasis ICT melalui sistem online (UJON) Kompetensi kewarganegaraan siswa setelah memanfaatkan media ICT dalam pembelajaran Pkn meliputi aspek: Watak kewarganegaraan (*civic Deposition*), Pengetahuan kewarganegaraan (*civic Knowledge*) dan Civic skill, penulis menyimpulkan dan memberikan rekomendasi bahwa pemanfaatan media ICT berperan membina karakter Pendidikan Kewarganegaraan siswa, Oleh karena itu pemanfaatan media ICT baik di sekolah harus dikembangkan agar dapat membentuk karakter pendidikan kewarganegaraan siswa yang lebih baik lagi untuk membentuk kepribadian bangsa yang lebih baik.

2. Jurnal

- a. Haerus Haerus, (2015) dalam Jurnalnya membahas Perpektif Islam terhadap pendidikan Kewarganegaran yang ditulis Harus menjelaskan bahwa: Setiap warga negara memang punya hak memperoleh pendidikan yang layak, namun setiap warga negara atau setiap diri manusia juga berkewajiban melaksanakan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu upaya edukasi yang bertujuan membentuk sikap dan perilaku kalangan pelajar supaya menjadi sumberdaya manusia yang unggul di bidang keilmuan, kebangsaan, dan moralitas. Dalam ajaran Islam, pendidikan demikian jelas menjadi model pendidikan yang harus diselenggarakan, karena akan memberikan banyak nilai guna secara moral, spiritual, intelektual, dan ketrampilan subyek edukasi. Kata kunci: pendidikan Islam, perilaku, keilmuan, kebangsaan
- b. Henni Yada Rahmayanti, dan Sri Mariamah (2020) *Dalimun the This study tries to make a systematic picture of how Integrated Learning Based on Islamic Character in Subjects of Civic Education (PPKn). With the location of the research in SMA Negeri 1 Mandastana, Barito Kuala*

Regency. The role of the teacher as: 1) a catalyst, the role model of a teacher is an absolute factor in the development of effective character education for students, because of their position as figures or idols imitated by students. 2) Inspirator means a teacher must be able to arouse students' enthusiasm to progress to develop their potential. 3) motivator, meaning that every teacher must be able to awaken the spirit, work ethic and extraordinary potential of students themselves. 4) dynamic, meaning each teacher has the ability to push students towards the achievement of goals with wisdom, patience, workmanlike, intelligent and upholds spirituality. 5). evaluator, means that every teacher is required to be able and always evaluate their attitudes or behaviors, and the learning methods used in the development of student character education, so that the level of effectiveness, efficiency and productivity of the program can be known. Thus it can be concluded that in the context of the education system in schools to develop Islamic character based education for students, teachers must be positioned or positioned themselves in the true nature, namely as instructors and educators, which means that in addition to transferring knowledge, it also educates and develops the participant's personality. students through the intractions they do in the classroom and outside the classroom.

Henni Yada Rahmayanti dan Sri Mariamah, (2020) dalam Penelitiannya membuat gambaran sistematis bagaimana Pembelajaran Terpadu Berbasis Karakter Islam pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn). Dengan lokasi penelitian di SMAN 1 Mandastana Kab. Barito Kuala. Peran guru sebagai: 1) sebagai katalisator, teladan seorang guru merupakan faktor mutlak dalam pengembangan pendidikan karakter yang efektif bagi siswa, karena posisinya sebagai tokoh atau idola yang ditiru oleh siswa. 2) Inspirator adalah guru harus mampu membangkitkan semangat siswa untuk maju mengembangkan potensinya. 3) motivator, artinya setiap guru harus mampu membangkitkan semangat, etos kerja dan potensi diri siswa yang luar biasa. 4) dinamis, artinya setiap guru memiliki kemampuan untuk mendorong siswa menuju pencapaian tujuan dengan kebijaksanaan, kesabaran, cekatan, cerdas dan menjunjung tinggi spiritualitas. 5). evaluator, artinya setiap guru dituntut mampu dan selalu mengevaluasi sikap atau perilakunya, serta metode pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan pendidikan karakter siswa, sehingga dapat diketahui tingkat keefektifan, efisiensi dan produktivitas program. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam konteks sistem pendidikan di sekolah untuk mengembangkan pendidikan berbasis karakter islami bagi peserta didik, guru harus memposisikan atau memposisikan diri pada hakikat yang sebenarnya yaitu sebagai pengajar dan pendidik yang artinya selain sebagai penyalur ilmu. , juga mendidik dan mengembangkan kepribadian peserta. siswa melalui interaksi yang mereka lakukan di dalam kelas dan di luar kelas.

- c. *Asrori Mukhtarom, Ety Kurniyati, Desri Arwen, (2019) dalam jurnalnya membahas bagaimana perspektif al-Qur'an tentang PKn. Dengan*

menggunakan metode tafsir maudhû'î dan metode historis kritis kontekstual dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PKn adalah upaya membentuk warga negara yang baik. Menurut al-Qur'an, warga negara yang baik adalah warga yang memiliki hubungan harmonis dengan Tuhan yang diwujudkan dengan sikap takwa dan beriman, memiliki hubungan harmonis sesama manusia yang diwujudkan dengan sikap saling mengenal atau bersaudara dan melaksanakan amar ma'rûf nahî munkar, serta memiliki hubungan harmonis dengan alam yang diwujudkan dengan penjagaan dan pelestarian lingkungan. Materi PKn yang diisyaratkan al-Qur'an meliputi hak asasi manusia, persaudaraan, persamaan dan keadilan, serta bela negara berlandaskan nilai-nilai tauhid yang bermuara pada satu tujuan yaitu ibadah kepada Allah.

G. Definisi Operasional

1. Pengembangan Kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan rencana kurikulum yang luas dan spesifik. Proses ini berhubungan dengan seleksi dan pengorganisasian berbagai komponen situasi belajar mengajar, antara lain penetapan jadwal pengorganisasian kurikulum dan spesifikasi tujuan yang disarankan, mata pelajaran, kegiatan, sumber, dan alat pengukur pengembangan kurikulum yang mengacu pada kreasi sumber-sumber unit, rencana unit, dan garis pelajaran kurikulum ganda lainnya, untuk memudahkan proses belajar-mengajar. Hamalik (2013:183-184)
2. PPKn adalah Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki visi dan misi mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, melalui proses menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya; dan memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru; memahami dan menerapkan pengetahuan faktual dan konseptual tentang kewarganegaraan; dan menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual kewarganegaraan dengan terampil. Untuk itu dikembangkan substansi pembelajaran yang dijiwai oleh 4 (empat) konsensus kebangsaan yaitu (1) Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup; (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (3) Negara Kesatuan

Republik Indonesia, sebagai komitmen terhadap bentuk final Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia; (4) dan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud kesadaran atas keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang utuh dan kohesif secara nasional dan harmonis dalam pergaulan antarbangsa. (Direktorat Jendral Pendidikan dadasar dan menengah, 2016: 13-14)

3. Berbasis Islami yaitu kurikulum PPKn berdasar atas nilai-nilai Islam. Al Qur'an, Sunnah atau Al hadits, dan pendapat ulama menjadi sumber nilai-nilai Islam ke dalam kurikulum PPKn.

a. Tentang nilai-nilai Islam, Ibnu Khalman mengatakan: mengajarkan Al-Quran merupakan dasar pengajaran dalam semua sistem pengajaran di berbagai negara Islam, karena hal itu merupakan salah satu syiar agama yang berpengaruh terhadap proses pematapan aqidah dan meresapnya iman. (Nasikh, 19971: 156-157). Rasulullah menjelaskan betapa pentingnya belajar Al-Quran. sabdanya:

Sebaik-baiknya orang di antara kamu adalah mempelajari Al-Qur'an, dan mengajarkannya (HR Bukhari).

b. Al Hadits

Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ رَسُولِهِ

Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, (yaitu) Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. (Hadits Shahih Lighairihi, H.R. Malik; al-Hakim, al-Baihaqi, Ibnu Nashr, Ibnu Hazm. Dishahihkan oleh Syaikh Salim al-Hilali di dalam At Ta'zhim wal Minnah fil Intisharis Sunnah, hlm. 12-13).

c. Pendapat Ulama

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda:

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

Artinya: "Ulama adalah ahli waris para nabi." (H.R. At-Tirmidzi dari Abu Ad-Darda Radhiallahu 'Anhu).